

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan adalah agenda yang dideklarasikan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 25 September 2015, mencakup 17 tujuan terkait dengan pembangunan yang adil dan lingkungan yang berkelanjutan. Deklarasi ini diikuti oleh 159 negara di markas besar PBB (Arifianti & Widianingsih, 2022). SDGs terdiri dari 17 tujuan dengan 169 target yang dikelompokkan menjadi empat pilar utama: pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, hukum, dan tata kelola. Tujuan utama dari pendeklarasian SDGs adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dalam setiap aspek kehidupan saat ini dan masa depan, tanpa menguras sumber daya alam secara berlebihan (Arum & Farida, 2023).

Pendeklarasian SDGs dipicu oleh masalah dalam pembangunan yang hanya menekankan pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan dampak negatif yang dihasilkan (Hayati et al., 2020). Hal ini menunjukkan bahwa selama ini, isu-isu sosial dan lingkungan belum diintegrasikan secara memadai dalam pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, beberapa lembaga keuangan global telah membentuk inisiatif untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Indonesia, sebagai anggota PBB, menyetujui untuk mengadopsi SDGs, yang dibuktikan dengan penerbitan Perpres Nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Arifianti & Widianingsih, 2022).

Isu lingkungan di Indonesia merupakan aspek yang signifikan yang memerlukan perhatian lebih, mengingat implikasi yang timbul dari kurangnya pengelolaan lingkungan yang efektif. Masalah kerusakan lingkungan, baik penyebab maupun dampaknya pada kehidupan manusia, memiliki konsekuensi negatif baik pada masa kini maupun di masa depan. Hal ini telah mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan (Purnamawati, 2018). Kerusakan lingkungan sering dikaitkan dengan keberadaan perusahaan, karena aktivitas perusahaan dapat menyebabkan degradasi lingkungan jika tidak dikelola dengan baik (Chairanee et al., 2022). Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang tepat untuk meminimalkan dampak kerusakan lingkungan akibat aktivitas

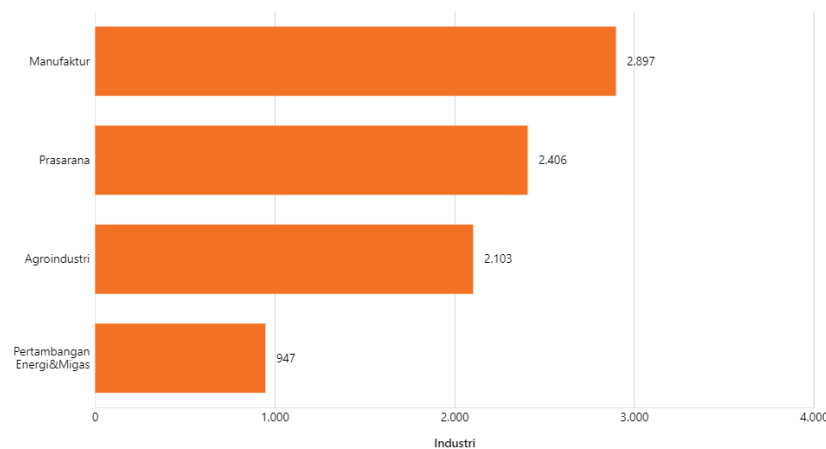
perusahaan. Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mengatur bahwa perusahaan yang terlibat dalam pemanfaatan lingkungan diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya.

Meskipun sudah diatur dalam Undang-Undang, hal ini tidak menjamin bahwa sebuah perusahaan telah sepenuhnya melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Di samping itu, keberadaan perusahaan juga dianggap dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, baik dalam hal konsumsi maupun penciptaan lapangan kerja (Ajeng, 2022). Sebuah perusahaan memiliki posisi yang krusial dalam lingkungan masyarakat, yang disebut sebagai "pedang bermata dua", karena dampaknya sangat signifikan. Apabila perusahaan menjalankan tanggung jawab sosialnya dengan baik, maka akan memberikan dampak positif pada masyarakat. Namun, sebaliknya, jika perusahaan gagal memenuhi tanggung jawab sosialnya, dampak negatif yang dirasakan masyarakat dapat berupa kebisingan, pencemaran air, tanah, udara, dan bahkan kesenjangan sosial (Abdullah & Amiruddin, 2020).

Dampak negatif yang dihasilkan dari aktivitas perusahaan telah memicu pergeseran orientasi dalam dunia bisnis dari *Single P (Profit)* menuju *Triple Bottom Line* mencakup tiga aspek yakni keuntungan, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Konsep *Triple Bottom Line* diperkenalkan oleh John Elkington pada tahun 1997 dalam bukunya yang berjudul "*Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of Twentieth Century Business.*" (Diwanti, 2022). Konsep ini menekankan bahwa perusahaan tidak hanya memusatkan perhatian pada profit semata (*Single Bottom Line*), tetapi juga memperhatikan hubungan sosial dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) serta keberlanjutan lingkungan alam untuk mendukung peningkatan kinerja dan nilai perusahaan (Ayu & Suarjaya, 2017).

Masalah lingkungan saat ini sebagian besar terkait dengan perusahaan di sektor manufaktur, infrastruktur, dan agroindustri (Wulandari et al., 2023). Sektor manufaktur secara khusus dianggap sebagai kontributor utama terhadap masalah lingkungan saat ini. Hal ini disebabkan oleh ukuran sektor manufaktur yang besar di Indonesia yang sering kali tidak memperlakukan limbah produksi dengan baik.

Akibatnya, limbah dari kegiatan manufaktur sering dibuang sembarangan dan mencemari lingkungan sekitar, seperti terlihat dari data pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Industri penghasil limbah B3 terbesar selama tahun 2021
(Sumber: Dihni, 2022)

Berdasarkan data tersebut, Industri manufaktur memberikan kontribusi utama dalam pencemaran lingkungan, khususnya limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan melibatkan 2.897 industri. Meskipun demikian, Industri manufaktur juga dianggap sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, fokus yang lebih besar diperlukan pada Industri manufaktur untuk mendorong pemerataan dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang inklusif (Hartarto, 2019). Selain itu, industri prasarana menghasilkan limbah B3 dari 2.406 industri, industri pertanian (agroindustri) dari 2.103 industri, dan industri pertambangan energi serta migas dari 947 industri.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menilai kepatuhan sektor usaha manufaktur dan prasarana terhadap pengelolaan lingkungan masih tergolong rendah (Wulandari et al., 2023). Di sisi lain, kesadaran perusahaan terhadap lingkungan sangat penting, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan masyarakat. Untuk mendukung keberlanjutan, Pemerintah Indonesia telah bergabung dengan SDGs, sebuah asosiasi internasional. Peresmian agenda SDGs membawa paradigma baru bagi Indonesia, seperti transformasi ke arah pengembangan berkelanjutan dan ekonomi hijau.

Dasar pembangunan berkelanjutan tersebut diamanatkan dalam Perpres Nomor 111 Tahun 2022 mengenai pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Perpres tersebut mendorong berbagai inisiatif untuk mendapatkan pendanaan inovatif, termasuk melalui pembiayaan publik, *SDGs Bond* (Obligasi berbasis SDGs), dan Taksonomi Hijau (Ekonomi hijau), dan lainnya. Karena itu, Indonesia membutuhkan kolaborasi dan sinergi dari berbagai pihak untuk mewujudkan Visi "Indonesia Emas di tahun 2045".

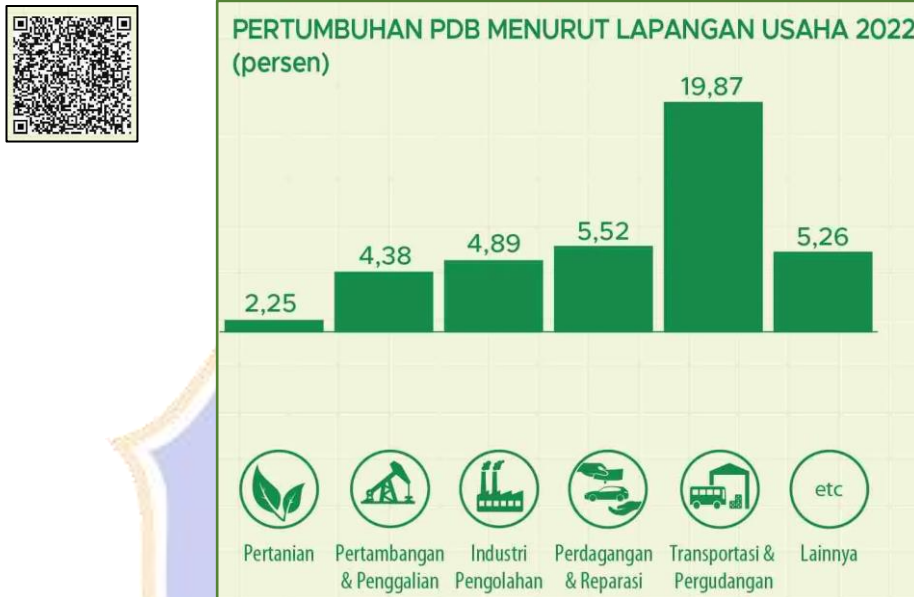


Gambar 1.2 17 Tujuan atau Goals dari SDGs
(Sumber: Irhamsyah, 2019)

Ke-17 tujuan SDGs seperti terlihat pada Gambar 1.2 didasarkan pada 3 pilar, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan. Fokus pada pilar ekonomi merupakan langkah awal yang penting mengingat kontribusi yang signifikan dari kegiatan ekonomi terhadap isu lingkungan yang dihasilkan. Namun demikian, penting untuk diketahui bahwa keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup berbagai aspek seperti kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender dan perlindungan lingkungan. Dalam konteks SDGs, setiap tujuan memiliki relevansi dengan aspek ekonomi (Pangestu et al., 2021). Untuk mengetahui keefektifan suatu perusahaan terhadap lingkungan, indikator PDB (Produk Domestik Bruto) dapat digunakan sebagai metrik suatu perusahaan.

Pada tahun 2022, sektor pertanian menyumbang PDB sebesar 2,25%, sementara sektor Pertambangan & Penggalian berkontribusi pada PDB sebesar 2%. Industri Pengolahan, dengan PDB sebesar 4,89%, berada di peringkat ketiga

dalam kontribusi ekonomi, sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 1.3. Sektor pertanian, pertambangan, dan industri pengolahan termasuk dalam ranah perusahaan manufaktur karena sektor pertanian menghasilkan bahan mentah untuk diolah lebih lanjut. Meskipun demikian, kontribusi ekonomi dari sektor manufaktur ternyata relatif kecil dibandingkan dengan skala sektor tersebut di Indonesia.



Gambar 1.3 Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha 2022
(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022)

Analisis data ini menunjukkan bahwa sektor manufaktur di Indonesia belum sepenuhnya memanfaatkan potensinya dalam mendukung program keberlanjutan ekonomi. Keberlanjutan usaha sangat penting sejalan dengan konsep pembangunan ekonomi yang bertujuan memenuhi kebutuhan masa kini dengan tidak mengorbankan kemampuan generasi masa depan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi (Werastuti et al., 2023).

SDGs sering digunakan untuk menggambarkan upaya perusahaan dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial. Isu lingkungan yang saat ini paling berdampak disebabkan oleh kegiatan ekonomi, seperti kerusakan lingkungan dan krisis lingkungan yang terjadi (Lako, 2018). Salah satu solusi untuk memperbaiki masalah lingkungan dan meningkatkan keberlanjutan adalah melalui pengembangan anggaran dan

laporan yang dapat menggambarkan kesadaran perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya. Konsep ini dikenal sebagai akuntansi hijau atau *green accounting*.

Konsep *green accounting* berkembang sebagai respons terhadap isu lingkungan yang mendapat perhatian utama di seluruh perusahaan, dengan akuntansi diidentifikasi sebagai faktor kontributor karena kurangnya informasi akuntansi yang mencerminkan aspek lingkungan. *Green accounting* hadir sebagai upaya solutif untuk mengatasi dampak lingkungan yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi perusahaan (Bartelmus & Seifert, 2018). *Green accounting* adalah bagian disiplin akuntansi yang memperhitungkan biaya dan manfaat dari aktivitas ekonomi perusahaan yang terkait dengan dampak lingkungan serta kesehatan bisnis (Hamidi, 2019). Penggunaan *green accounting* mampu menciptakan keunggulan kompetitif di pasar dengan merangsang persepsi positif serta loyalitas pelanggan terhadap produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan (Werastuti et al., 2023).

Green accounting tidak lagi mengandalkan pada model ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan secara berlebihan. Dalam hal ini, perusahaan diarahkan untuk tidak hanya fokus pada keuntungan jangka pendek (Purnamawati et al., 2023). *Green accounting* bertujuan untuk mengelola lingkungan secara efisien dengan mengevaluasi dampak lingkungan dari aktivitas produksi perusahaan melalui analisis biaya dan manfaat, diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi perlindungan lingkungan (Ulupui et al., 2020). Secara sederhana, implementasi *green accounting* dapat mendukung perusahaan mengurangi kerusakan lingkungan serta meraih keunggulan kompetitif melalui praktik produksi yang ramah lingkungan (Werastuti et al., 2023).

Tujuan utama setiap perusahaan adalah meningkatkan profitabilitas. Namun saat ini, perusahaan juga dituntut untuk mempertanggungjawabkan dampak lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan operasional mereka, bukan hanya fokus pada meningkatkan keuntungan (Nisa et al., 2020). Walaupun demikian, Profitabilitas tetap menjadi indikator penting dalam menilai perusahaan, karena rasio profitabilitas dapat digunakan untuk mengukur capaian terhadap laba dan efektivitas pengelolaan sumber daya (Bakhtiar, 2020).

Profitabilitas dipergunakan oleh investor sebagai tolak ukur dalam pengambilan keputusan investasi. Investor akan semakin berminat untuk menginvestasikan modalnya apabila rasio profitabilitasnya dalam keadaan baik. Oleh karena itu, pada saat perusahaan melakukan kinerja keuangan serta kinerja lingkungannya dengan baik, maka hal tersebut akan meningkatkan keahlian bersaing yang efektif untuk perusahaan dimata para *stakeholder* perusahaan (Tisna et al., 2020).

Profitabilitas merupakan rasio keuangan yang menilai capaian perusahaan dalam memperoleh laba bagi pemegang saham. Tingginya profitabilitas menyediakan lebih banyak informasi bagi *stakeholder* untuk meyakinkan mereka tentang kinerja perusahaan (Hitchner, 2017). Rasio profitabilitas mencerminkan sejauh mana perusahaan mampu memperoleh laba yang besar (Fahmi, 2017). Perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi berupaya untuk memenuhi kepentingan *stakeholder* dalam rangka menjalin hubungan baik dengan seluruh *stakeholder*.

Lima klasifikasi rasio profitabilitas yang biasa digunakan (Hery dalam Setyowati et al., 2023), diantaranya: 1) *Return on Asset*, 2) *Return on Equity*, 3) *Gross Profit Margin*, 4) *Operating Profit Margin*, dan 5) *Net Profit Margin*. Instrumen yang digunakan untuk mengukur profitabilitas dalam penelitian ini yakni rasio *Return on Aset* dan *Return on Equity*. *Return on Aset* (ROA) mencerminkan peran aset perusahaan dalam memperoleh laba bersih, sementara *Return on Equity* (ROE) memberikan informasi tentang kemampuan perusahaan dalam menciptakan laba dan nilai bagi investor.

Meskipun partisipasi perusahaan dalam *green industry* meningkat, pencemaran lingkungan oleh perusahaan manufaktur di Indonesia tidak mengalami penurunan (Wulandari et al., 2023). Fenomena ini berkaitan dengan isu *Corporate Social Responsibility* (CSR), di mana akuntabilitas yang dilakukan masih tidak sebanding dengan dampak pencemaran yang dihasilkan. Pelaporan CSR oleh perusahaan dalam laporan tahunan saat ini bersifat sukarela. Alasannya adalah pertimbangan biaya dan manfaat yang diperhitungkan perusahaan terkait dengan pengungkapan informasi lingkungan. Konsekuensinya, fungsi CSR

sebagai bentuk akuntabilitas eksternalisasi masih kurang optimal (Rachmania et al., 2021).

CSR adalah aspek penting dalam upaya membangun citra dan memelihara nama baik perusahaan. Peran CSR sejalan dengan isu lingkungan saat ini, karena hal ini dapat membuktikan perhatian perusahaan terhadap aspek lingkungan dalam aktivitasnya (Oktina et al., 2020). Perubahan orientasi bisnis akibat isu lingkungan menyebabkan *stakeholder* bukan hanya memerlukan data keuangan, tetapi juga data non-keuangan seperti dokumen keberlanjutan (Werastuti et al., 2021). Program CSR adalah komitmen perusahaan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Program ini bukan hanya sebagai ajang promosi, tetapi sebagai panggilan kepada dunia usaha bahwa kegiatan ini adalah keharusan dan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan, yang merupakan landasan utama kegiatan ekonomi (Kurnia et al., 2020).

Program pelestarian lingkungan dan pembangunan sosial untuk mencapai SDGs harus memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar perusahaan. Perusahaan besar memiliki dampak ekonomi yang besar bagi lingkungan dan masyarakat. Tingkat keterlibatan *stakeholder* akan semakin tinggi seiring dengan semakin besarnya sumber daya yang dikelola oleh perusahaan (Trevanti & Yuliati, 2023). Oleh karena itu, perusahaan harus lebih transparan dalam pengungkapan aktivitasnya, termasuk tanggung jawab sosialnya (Dizar et al., 2019).

Ukuran perusahaan merupakan sebuah parameter untuk mengklasifikasikan suatu entitas usaha sebagai perusahaan besar atau kecil. Skala suatu perusahaan dapat diukur melalui pendapatan, total aset, dan modal (Malik et al., 2022). Menurut Rantika et al (2022), besarnya suatu perusahaan menjadi faktor kunci dalam menentukan tingkat laba yang dihasilkan, terutama karena sejalan dengan besarnya aset yang dimiliki. Hal ini secara langsung mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari modal usaha.

Perusahaan berskala besar memiliki profil publik lebih tinggi dan memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan investor. Seiring dengan pergeseran orientasi *stakeholder* menuju konsep 3P (*Planet, People, Profit*), Perusahaan berskala besar membutuhkan tingkat transparansi dan mengungkapkan informasi yang lebih luas jika dibandingkan perusahaan kecil.

Langkah ini penting demi memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak dan untuk menjamin kelangsungan usaha. Oleh karena itu, perhatian perusahaan cenderung lebih terfokus pada dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas usahanya (Humairoh, 2018).

Penelitian sebelumnya mengenai SDGs dengan *green accounting* sebagai variabel independen oleh Selpiyanti & Fakhroni (2020) dan Dura & Suharsono (2022) yang menyimpulkan bahwa *green accounting* berhubungan positif dan signifikan dalam pencapaian SDGs. Perusahaan yang menerapkan dan melaporkan biaya konservasi lingkungan mampu meningkatkan SDGs. Temuan ini bertentangan dengan temuan May et al. (2023) dan Abdullah & Amiruddin (2020), menyimpulkan *green accounting* tidak selalu memberikan dampak signifikan, karena banyak perusahaan masih mengklasifikasikan biaya lingkungan dalam kategori biaya lainnya.

Penelitian mengenai SDGs dengan Profitabilitas sebagai variabel independen telah menjadi fokus beberapa peneliti sebelumnya, meskipun literatur yang memperhatikan variabel ini masih tergolong minim. Studi sebelumnya oleh Wiguna & Indarti (2022) dan Liana (2019), menyatakan bahwa profitabilitas berdampak positif dan signifikan pada pengungkapan SDGs. Pengungkapan SDGs yang lebih tinggi diyakini mendorong perusahaan untuk meningkatkan citra dan reputasinya di mata masyarakat, khususnya mengatasi persepsi bahwa perusahaan hanya mengutamakan keuntungan bagi pemegang saham tanpa memedulikan dampak sosialnya. Namun, temuan ini bertentangan dengan penelitian Trisnawati & Putri (2022) dan Mandagie et al. (2022), menegaskan profitabilitas yang diukur menggunakan ROA tidak berpengaruh pada pengungkapan SDGs. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi tidak selalu terlibat dalam aktivitas sosial, karena laba yang diperoleh lebih banyak dialokasikan untuk operasional, sehingga membatasi dana untuk kegiatan sosial. Pandangan ini menggambarkan bahwa pengungkapan SDGs bukan merupakan kegiatan merugikan, tetapi juga bukan strategi jangka panjang yang dianggap memberikan dampak positif yang signifikan pada kinerja perusahaan.

Penelitian mengenai SDGs dengan menggunakan CSR sebagai variabel independen oleh Yuliasih & Susetyo (2020) dan Kurnia et al. (2020),

menyimpulkan pengungkapan CSR memiliki dampak positif dan signifikan dalam pengungkapan pembangunan berkelanjutan. Implementasi CSR dapat dianggap sebagai solusi terhadap masalah lingkungan yang timbul akibat aktivitas ekonomi perusahaan. CSR mencerminkan kesadaran perusahaan dalam meningkatkan hubungan dengan masyarakat dan lingkungan, sehingga memiliki relevansi yang kuat dengan keberlanjutan perusahaan. Terdapat perbedaan jika dibandingkan penelitian Apriliyani & Novita (2019) dan Putri (2022), yang menyatakan tidak semua program CSR berkontribusi pada pencapaian target SDGs. Selain itu, CSR merupakan program berkelanjutan jangka panjang bagi perusahaan; konsistensi dalam implementasi diperlukan untuk dampak yang berkelanjutan terhadap lingkungan dan masyarakat.

Ukuran perusahaan dijadikan sebagai moderasi untuk mengamati ukuran perusahaan memperkuat atau memperlemah efek dari penerapan *green accounting*, profitabilitas, dan CSR dalam peningkatan SDGs. Ukuran perusahaan merupakan parameter untuk mengelompokkan sebuah entitas usaha sebagai perusahaan besar atau kecil. Dimensi perusahaan dapat mempengaruhi tingkat keterbukaan informasi sosialnya (Humairoh, 2018). Secara umum, perusahaan berskala besar cenderung memberikan laporan sosial lebih komprehensif daripada perusahaan skala kecil. Fenomena ini berkaitan dengan konsep *green accounting* dan implementasi CSR. Lebih lanjut, pengungkapan informasi sosial juga berdampak pada tingkat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap perusahaan tersebut. Hal ini menandakan bahwa ukuran perusahaan memiliki keterkaitan erat dengan kemampuan dan adaptabilitas perusahaan dalam mencapai profitabilitas dengan mempertimbangkan pertumbuhan aset perusahaan (K. Y. Dewi & Rahyuda, 2020).

Penelitian oleh Trevanti dan Yuliati (2023) mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan mampu memperkuat pengaruh akuntansi hijau dalam pencapaian SDGs. Hasil penelitian Rahmantari (2021) dan Kurnia et al. (2020), menyatakan dimensi perusahaan dapat memperkuat pengaruh CSR dan profitabilitas dalam pencapaian SDGs. Selain itu, kajian yang dilakukan oleh Ghozali & Rohman (2019), Dizar et al. (2019) dan Roestanto et al. (2022) menyatakan ukuran perusahaan berperan dalam pencapaian SDGs. Berdasarkan review literatur

tersebut, pemanfaatan dimensi perusahaan sebagai variabel moderasi terhadap SDGs masih relatif terbatas.

Teori legitimasi diperkenalkan oleh Dowling dan Pfeffer (1975), menunjukkan adanya hubungan yang erat antara perusahaan dan masyarakat. Teori ini berpendapat, organisasi atau perusahaan tetap dapat bertahan melakukan kegiatan usaha atau beroperasi, jika tumbuh kesadaran masyarakat bahwa perusahaan beroperasi sejalan dengan nilai-nilai yang diyakini masyarakat.

Teori legitimasi mendorong perusahaan guna meyakinkan masyarakat bahwa kegiatan usahanya mencerminkan tanggung jawab perusahaan pada lingkungan melalui laporan tahunan (Saputra, 2020). Dalam penelitian ini, teori legitimasi menjadi dasar yang relevan karena variabel yang digunakan berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan ekonomi perusahaan dengan mempertimbangkan dampaknya pada lingkungan di mana perusahaan beroperasi.

Selain teori legitimasi, peneliti juga memasukkan teori *stakeholder* sebagai landasan teoritis tambahan. Teori ini, yang dikembangkan oleh Freeman dan McVea (2005), menekankan bahwa perusahaan harus memperhatikan kebutuhan semua pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, dan mempertimbangkan keseimbangan kebijakan dan keputusan yang diberikan kepada mereka. Hal tersebut sejalan dengan teori *stakeholder* yang mendasari pentingnya perusahaan mengembangkan keunggulan kompetitif untuk memperkuat hubungan dengan pihak yang berkepentingan (Werastuti et al., 2023).

Pada Gambar 1.4, terlihat bahwa variabel yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur SDGs seperti *Green Accounting*, Profitabilitas, CSR, dan Ukuran Perusahaan masih memiliki tingkat penggunaan yang minim. Hal ini terbukti dengan ketiadaan keempat variabel tersebut dalam analisis metadata menggunakan *VosViewer* berbasis *Publish or Perish 8* dengan sampel 200 jurnal. *VosViewer* merupakan perangkat lunak yang berguna untuk membangun dan memvisualisasikan jaringan *bibliometrik* termasuk jurnal, judul, pengarang, dan lainnya. Penggunaan perangkat lunak *VosViewer* dalam penelitian ini bertujuan untuk memudahkan pemetaan topik penelitian yang direncanakan. Selain itu,

mengindikasikan adanya ketidakseimbangan dalam paradigma pembangunan yang perlu diselesaikan guna mencapai keberlanjutan. Oleh karena itu, diperlukan transformasi dalam pendekatan pembangunan untuk memastikan integrasi yang lebih baik antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan.

- 2) Isu lingkungan akibat kegiatan industri. Limbah yang dihasilkan dari kegiatan industri berupa bahan berbahaya dan beracun (B3) menjadi perhatian utama, karena limbah semacam ini dapat mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Evaluasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan industri, terutama manufaktur dan infrastruktur, dalam pengelolaan lingkungan. Ini mengindikasikan perlunya penegakan regulasi yang lebih ketat dan pemantauan yang efektif terhadap kegiatan industri.
- 3) *Green accounting* yang seharusnya membantu menggambarkan dampak lingkungan dari aktivitas ekonomi perusahaan, masih minim diadopsi. Banyak perusahaan tidak memasukkan biaya lingkungan dan dilaporkan secara terpisah dalam laporan keuangan mereka.
- 4) Meskipun profitabilitas perusahaan penting untuk daya tarik investor, hubungan antara profitabilitas dengan pencapaian SDGs masih belum jelas. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas tinggi tidak selalu berdampak positif pada pencapaian SDGs.
- 5) Pelaporan CSR oleh perusahaan bersifat sukarela, dan banyak perusahaan cenderung tidak melaporkan informasi lingkungan secara transparan karena pertimbangan biaya dan manfaat. Hal ini mengurangi akuntabilitas eksternal perusahaan terhadap dampak lingkungan mereka.
- 6) Perusahaan skala besar cenderung memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tinggi. Adanya perbedaan pendekatan dan transparansi dalam pelaporan di antara perusahaan besar dan kecil. Hal ini mempengaruhi persepsi dan kepercayaan masyarakat terhadap tanggung jawab perusahaan.
- 7) Adanya inkonsistensi dari penelitian-penelitian terdahulu terkait variabel yang telah dipergunakan, dengan demikian, diperlukan penelitian tambahan untuk meningkatkan akurasi pengaruh variabel *Green Accounting*, Profitabilitas, dan CSR terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs).

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini menggunakan *Green Accounting*, Profitabilitas, dan *Corporate Social Responsibility* sebagai variabel *independen* untuk mengukur dampaknya terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai variabel *dependen*. Selain itu, penelitian ini juga menguji peran Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi untuk melihat apakah ukuran perusahaan dapat memperkuat hubungan antara praktik keberlanjutan dan pencapaian SDGs.

1.4 Rumusan Masalah

Mengacu pada penjelasan mengenai masalah yang diuraikan, dirumuskan beberapa permasalahan, yakni:

- 1) Apakah *Green Accounting* berpengaruh positif dan signifikan terhadap SDGs?
- 2) Apakah Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap SDGs?
- 3) Apakah CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap SDGs?
- 4) Apakah Ukuran Perusahaan memperkuat pengaruh *Green Accounting* terhadap SDGs?
- 5) Apakah ukuran perusahaan memperkuat pengaruh Profitabilitas terhadap SDGs?
- 6) Apakah ukuran perusahaan memperkuat pengaruh CSR terhadap SDGs?

1.5 Tujuan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti ingin memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah diidentifikasi, dengan merangkum menjadi tujuan penelitian, yaitu:

- 1) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Green Accounting*, Profitabilitas, dan *Corporate Social Responsibility* terhadap *Sustainable Development Goals* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI
- 2) Untuk menguji dan menganalisis ukuran perusahaan memperkuat pengaruh *Green Accounting*, Profitabilitas, dan *Corporate Social Responsibility* terhadap *Sustainable Development Goals* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teori

Kontribusi teoritis dari temuan penelitian diharapkan dapat:

- 1) Memberikan pemahaman teori dan konsep pembangunan berkelanjutan, khususnya terkait dengan agenda SDGs. Ini mencakup aspek pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, perlindungan lingkungan, dan pemberdayaan sosial. SDGs mengemukakan pentingnya perusahaan untuk lebih memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas ekonominya. Teori legitimasi menegaskan pentingnya perusahaan meyakinkan masyarakat bahwa kegiatan mereka sejalan dengan nilai-nilai yang diakui masyarakat
- 2) Memberikan pemahaman bahwa pendekatan SDGs dengan mempertimbangkan konsep 3P (*Planet, People, Profit*) sesuai teori *stakeholder* yang menekankan perusahaan seharusnya memperhatikan kepentingan seluruh pihak yang terlibat, baik dari dalam maupun luar perusahaan.
- 3) Memberikan pemahaman bagaimana teori legitimasi dan *stakeholder* mempengaruhi perilaku perusahaan dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan memperhatikan kebutuhan semua pemangku kepentingan
- 4) Dapat menjelaskan mengenai peran variabel *green accounting*, profitabilitas, dan CSR berdampak positif dan signifikan dalam pencapaian SDGs
- 5) Dapat menjelaskan mengenai peran ukuran perusahaan mampu memoderasi *green accounting*, profitabilitas, dan CSR terhadap pencapaian SDGs.

1.6.2. Manfaat Praktis

Implementasi SDGs oleh negara-negara termasuk Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap adopsi regulasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Penyelarasan regulasi dengan prinsip-prinsip SDGs penting untuk pengelolaan lingkungan dan meningkatkan tanggung jawab sosial sektor usaha. Di samping itu, SDGs bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup sekarang dan di masa mendatang dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Implementasi SDGs dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan lingkungan dengan mendorong pengembangan ekonomi hijau. Inisiatif seperti akuntansi hijau telah mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. SDGs juga memberikan landasan bagi perusahaan untuk meningkatkan praktik CSR, sehingga dapat mengurangi dampak negatif dan meningkatkan kontribusi positif perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat.

Penelitian ini menghubungkan variabel *green accounting*, profitabilitas, CSR, dan ukuran perusahaan dengan SDGs memberikan arah baru bagi penelitian dan inovasi dalam bidang pembangunan berkelanjutan, mencerminkan pentingnya kerangka kerja SDGs dalam membentuk agenda penelitian yang lebih terfokus dan praktis.

1.7 Penjelasan Istilah

Penjelasan mengenai istilah dalam judul penelitian ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dalam pembahasan penelitian. Berikut adalah istilah yang dimaksud dalam penelitian ini:

- 1) *Green Accounting* adalah metode akuntansi yang meliputi pengukuran dan pelaporan dampak lingkungan dari kegiatan operasional perusahaan (Lako, 2018).
- 2) Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pendapatan yang diperoleh.
- 3) *Corporate Social Responsibility* adalah program atau upaya perusahaan untuk menunjukkan tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitarnya.
- 4) Ukuran Perusahaan (*Firm Size*) adalah ukuran yang merujuk pada klasifikasi perusahaan sebagai besar atau kecil, berdasarkan indikator yang dapat diukur dalam sektor usaha.
- 5) *Sustainable Development Goals* (SDG) adalah inisiatif global yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia secara sosial, ekonomi, dan lingkungan (Hadiwijoyo dan Anisa, 2019).

1.8 Asumsi Peneliti

Asumsi atau anggapan dasar merupakan gambaran sangkaan atau pendapat yang belum dibuktikan. Asumsi yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh dari *green accounting*, profitabilitas, dan CSR yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan dalam pencapaian SDGs studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2020-2023.

1.9 Rencana Publikasi

Rencana publikasi penelitian ini adalah pada jurnal nasional atau internasional yang minimal terindeks Sinta. Di Indonesia, penulisan dan publikasi artikel ilmiah dalam jurnal-jurnal tersebut masih relatif kurang. Meskipun banyak penelitian yang telah dilakukan, hasil-hasilnya sering kali hanya menjadi dokumentasi yang sulit diakses oleh masyarakat umum maupun ilmiah. Oleh karena itu, hasil penelitian ini akan dipublikasikan dalam bentuk artikel, baik di jurnal nasional maupun internasional, yang terakreditasi SINTA, dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, pemerintah, dan pembaca umum.

